

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Keynesian Theory (Teori Keynes) menurut John Maynard Keynes menyatakan bahwa ekonomi makro cenderung mempengaruhi perilaku ekonomi mikro.¹ Teori Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat terhadap pengangguran. Permintaan agregat merupakan semua permintaan yang berhubungan dengan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan agregat yang meningkat akan berpengaruh kepada kinerja sektor-sektor ekonomi dalam meningkatkan output. Output perusahaan yang meningkat akan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, sehingga berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan agregat yang meningkat akan mengurangi pengangguran. Teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran tidak dapat dilimpahkan secara keseluruhan terhadap mekanisme pasar bebas.²

Definisi sebelumnya menjelaskan bahwa Teori Keynes tidak dipengaruhi tinggi rendahnya upah. Karena menurut Teori Keynes jika upah rendah akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat menurun akan mengakibatkan produksi turun yang membuat perusahaan tidak membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Perusahaan jadi tidak dapat menyerap tenaga kerja.³ Teori Keynes menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat membantu dalam proses menanggulangi jumlah pengangguran. Kebijakan yang dibuat pemerintah ini dapat berupa menciptakan lapangan pekerjaan baru.⁴ Atau juga pemerintah dapat memberdayakan UMKM dengan pemberian bantuan dana, dan memberdayakan potensi daerah seperti pariwisata melalui pendanaan pemerintahan. Apabila pariwisata diberdayakan secara langsung akan menyerap tenaga kerja yang banyak.

¹ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London, Britania Raya: Palgrave Macmillan, 2007).

² Mahroji Dwi and Nurkhasanah Iin, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 9, no. 1 (2019).

³ Sukirno and Sadono, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2002).

⁴ Hadi Soesastro, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

Kebijakan pemerintah lainnya yang dapat membantu penanggulangan pengangguran pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang dapat meningkatkan daya beli sehingga permintaan agregat meningkat.⁵ John Maynard Keynes menyatakan bahwa Teori Keynes membutuhkan campur tangan pemerintah dalam meningkatkan atau mempertahankan permintaan agregat. Pemerintahan berpartisipasi dalam menjaga tingkat permintaan agregat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bertujuan mempertahankan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dan dapat menstabilkan permintaan agregat.⁶ Hal tersebut membuat pemerintah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang diakibatkan resesi.

B. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan dalam Indikator ketenagakerjaan pengangguran adalah sebutan bagi penduduk tidak bekerja yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan untuk membuat usaha baru. Atau yang sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja.⁷ Menurut Yosef Pengangguran merupakan sebutan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja tapi kurang dari dua hari seminggu.⁸ Nanga berpendapat pengangguran merupakan kondisi seseorang yang sesuai dengan karakteristik angkatan kerja. Seperti, seseorang yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. dan seseorang yang sudah bekerja tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak setiap hari

⁵ Ayu Feranika and Dini Haryati, "Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19," *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 2, no. 3 (2020): 146–52.

⁶ Soesastro, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terahir. Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terahir*, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

⁷ Badan Pusat Statistik, *Konsep Tenaga Kerja* (Pati, Jawa Tengah, 2022), <https://patikab.bps.go.id>.

⁸ Yosef Hartoko, "Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan Dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2019): 201–7.

hanya seminggu dua kali.⁹ Hasyim menyatakan bahwa Pengangguran diartikan sebagai masalah strategi dalam ekonomi makro karena memiliki pengaruh langsung kepada kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat.¹⁰

Definisi sebelumnya yang telah dijabarkan oleh Badan Pusat Statistik dan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa, Pengangguran adalah julukan bagi angkatan tenaga kerja yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran yang banyak dapat menyebabkan masalah ekonomi makro bagi negara. Bagi masyarakat sendiri kehilangan pekerjaan menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Pemerintah berusaha terus mengkaji mengenai kebijakan yang dibuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang telah tercipta diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.¹¹

2. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran digolongkan kedalam dua jenis berdasarkan pada ciri-ciri dan penyebabnya.¹² Pengangguran menurut ciri-ciri ada empat yaitu: Terbuka, Tersembunyi, Musiman dan Tenaga Kerja yang sudah bekerja tetapi hanya satu atau dua hari dalam seminggu. Pengangguran menurut penyebabnya ada empat yaitu: Normal (Friksional), Siklikal, Struktural dan Teknologi, Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis pengangguran:

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis-Jenis Pengangguran	
Ciri-Ciri	Penyebab
1. Pengangguran Terbuka merupakan pengangguran yang diakibatkan banyak angkatan tenaga kerja yang tidak dibarengi	1. Pengangguran normal (Friksional) merupakan tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan lain.

⁹ Muana and Nanga, *Makro Ekonomi, Teori, Masalah Dan Kebijakan*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁰ Hasyim Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro* (Depok: Kencana Prenadamedia, 2017).

¹¹ Gregory and Mankiw N, *Teori Ekonomi Makro*, keempat (Jakarta: Erlangga, 2006).

¹² Devit Prasetyo Sejati, “Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 98–105.

<p>dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi.</p> <p>2. Pengangguran Tersembunyi sering terjadi pada sektor jasa dan pertanian, karena kedua pekerjaan tersebut memerlukan tenaga kerja yang banyak tetapi hanya diperlukan saat-saat tertentu dan masa berlangsung pekerjaan yang tidak lama. Contohnya jasa cuci motor, buruh bangunan yang bekerja saat ada proyek saja, petani dan lain sebagainya.</p> <p>3. Pengangguran Musiman memiliki ciri yang sama dengan pengangguran tersembunyi, bedanya hanya pada sektor jasa. Pekerjaan yang membutuhkan jasa tidak memperdulikan musim untuk bekerja. Pertanian dan perikanan memerlukan musim untuk dapat bekerja. Pertanian dapat berjalan dengan baik kalau musim hujan dan kemaraunya tepat, tidak terlalu basah atau kering. Dalam sektor perikanan jika musim hujan apalagi badai</p>	<p>2. Pengangguran Siklikal ini terjadi berdasarkan pada permintaan agregat dari pengusaha atau perusahaan yang ingin menaikkan produksi baik barang maupun jasa. Jika permintaan agregat meningkat maka bagus karena akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, sebaliknya jika menurun maka tingkat pengangguran tetap atau bisa meningkatkan.</p> <p>3. Pengangguran Struktural dapat terjadi karena perusahaan sedang tidak dalam masa berkembang lebih maju. Ini terjadi akibat produk pesaing yang berinovasi menjadi baru, kurangnya pemahaman pada kemajuan teknologi, tidak dapat bersaing dan tingkat penjualan produksi menurun. Dari penjelasan tersebut perusahaan akan menurunkan tingkat produksi dan memberhentikan beberapa karyawannya.</p> <p>4. Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang</p>
---	---

<p>para nelayan tidak dapat pergi untuk mencari ikan. Pekerjaan yang berdasarkan pada musim ini membuat mereka yang bekerja akan mengganggu apabila musimnya tidak mendukung.</p> <p>4. Tenaga kerja yang telah bekerja, namun hanya bekerja satu atau dua hari dalam seminggu. Dengan ciri yang sudah dijelaskan para tenaga kerja digolongkan sebagai pekerja setengah mengganggu,</p>	<p>terjadi karena digantikan oleh teknologi mesin.</p>
--	--

3. Dampak pengangguran

Pengangguran memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian dan masyarakat. Karena dengan meningkatkannya pengangguran dapat melemahkan perekonomian dan menurunkan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Dari penjelasan sebelumnya maka dampak pengangguran akan digolongkan menjadi dua aspek sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi membuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melemah. Dapat dengan jelas dilihat bahwa pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah atau negara. Berikut ini dampak-dampak yang diakibatkan oleh pengangguran pada perekonomian¹⁴:

¹³ Ratna Kartika Sari, Bambang Iswanto, and Irma Yuliani, "Peran Balai Latihan Kerja Samarinda Mengurangi Tingkat Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Borneo Islamic Finance And Economics Journal* 2, no. 1 (2022): 52–66.

¹⁴ Yenni Del Rosa, Imran Agus, and Mohammad Abdilla, "Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter Dan Pengangguran Terhadap Perekonomian

- 1) Tidak maksimalnya tingkat kesejahteraan yang telah dicapai,
 - 2) Pendapatan pemerintah yang berkurang akibat rendahnya pendapatan dalam negeri, yang diakibatkan ekonomi menurun.
 - 3) Pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
- b. Dampak terhadap Masyarakat.
- Pengangguran sendiri berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja yang sebelumnya bekerja tetapi menganggur mempengaruhi pendapatan yang berakibat pada kualitas hidupnya.¹⁵ Selain hal itu ada beberapa dampak yang terjadi seperti:
- 1) Menyebabkan tenaga kerja kehilangan pekerjaannya
 - 2) Keterampilan yang menurun bahkan mungkin hilang karena pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan tidak dilakukan lagi.
 - 3) Berakibat pada tidak stabilnya kondisi sosial dan politik. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi lesu, timbulnya kesenjangan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.¹⁶ Abdul Halim berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. Pendapatan dengan cara dipungut berdasarkan pada perundang-undangan.¹⁷ Menurut

Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 21, no. 2 (2019): 283–93.

¹⁵ Cut Nova Rianda, “Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual,” *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah AT-TASYRI’* 12, no. 1 (2020): 17–26.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (Jakarta Pusat, Indonesia, 2022).

¹⁷ Armina Danindra Nuzula, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah*

Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari hasil pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekaayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lainnya yang sah.¹⁸ Samsubar menyatakan Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen yang menentukan berhasil atau tidak kemandirian pemerintah kabupaten dalam mengatur otonomi daerahnya.¹⁹ Menurut Yusuf Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah melalui pengelolaan, penambahan dan penggalian sumber keuangan daerah.²⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang sudah dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh sebuah daerah dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari dana yang dikelola secara mandiri oleh daerah tersebut, dan jumlahnya adalah setelah mengurangkan berbagai beban. Dana Pendapatan Asli Daerah ini diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan dan pengeluaran daerah tersebut.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan dari definisi diatas ada empat sumber pendapatan asli daerah. Berikut ini penjelasan mengenai keempat sumber:

a. Pajak Daerah

Pajak menjadi sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut pemerintah, diatur dan ditetapkan untuk membiayai pembangunan, pengelolaan dan pembangunan daerah. Pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan langsung. Hasil Pajak yang telah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018) (Tasikmalaya, Jawa Barat: Universitas Siliwangi, 2020).

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011).

¹⁹ Reni Marlina, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* (Bandung, Jawa Barat: Universitas Widyatama, 2020).

²⁰ Mohammad Yusuf, "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2020).

diterima pemerintah akan digunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan masyarakat.²¹ Contoh pajak daerah yang dipungut seperti, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).²²

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah berupa dana yang dipungut oleh pemerintah atas pembayaran masyarakat yang telah memakai jasa pekerjaan dan usaha atau milik pemerintah daerah, retribusi daerah tidak dapat terjadi tanpa adanya balas jasa.²³ Retribusi daerah bersifat ekonomis dan diberikan imbalan secara langsung. Retribusi bisa disebut sebagai bentuk kerja sama antar pemerintah dengan masyarakat.²⁴ Contoh Retribusi Daerah seperti, tempat pelelangan, terminal, tempat parkir khusus, penjualan produksi usaha daerah dan lain sebagainya.²⁵

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Hasil pengelolaan kekayaan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah. Hasil perusahaan milik daerah adalah pendapatan yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan berupa dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah yang

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009* (Jakarta Pusat, Indonesia, 2009).

²² Deni Ariyanti and Resi Yudhaningsih, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 3, no. 1 (2020): 65–79.

²³ Tri and Gabriel Sheren Ari Cornelia Utama Agata, *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2021* (Jombang: STIE PGRI Dewantara, 2023).

²⁴ Nurizzatin, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022).

²⁵ Aulia Rahmana Putri, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2016-2021," *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2022), <http://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jimek>.

masuk ke kas daerah.²⁶ Hasil perusahaan daerah bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa dan mengembangkan ekonomi daerah. Contoh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu, penjualan aset daerah yang dipisahkan, tuntutan ganti rugi, pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi dan lain-lainnya,²⁷

d. Pendapatan lainnya yang sah

Pendapatan lainnya yang sah merupakan pendapatan keuangan yang diperoleh daerah dari lain-lainnya milik pemerintah daerah.²⁸ Pendapatan yang termasuk kedalam pendapatan lainnya yang sah seperti, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan Bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing dan komisi atau potongan dari penjualan, pengadaan barang dan jasa. Pendapatan lainnya yang sah bersifat terbuka bagi pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah menurut undang-undang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari daerahnya sendiri melalui berbagai sumber. Pemungutan hasil pajak dan retribusi daerah harus sesuai ketentuan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pemungutannya ditetapkan berdasarkan pada peraturan undang-undang.²⁹ Hasil dari penerimaan pendapatan dari pajak, retribusi, pengelolaan

²⁶ Pratama, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016).

²⁷ Yusuf Hafandi and Romandhon, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>.

²⁸ Agustin YL and Utomo SW, *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun* (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2018).

²⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Jakarta Pusat, Indonesia, 2022).

kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah digunakan untuk mendanai segala pelaksanaan otonomi daerah, seperti program memajukan daerah melalui penguatan potensi daerah.

4. Dampak Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut ini dampak yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah:

- a. Meningkatkan dana milik daerah.
- b. Meningkatkan kemandirian daerah.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Meningkatkan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah.
- e. Menurunkan tingkat pengangguran.³⁰

Dampak negatif penurunan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Menurunnya dana yang dimiliki daerah.
- c. Menurunnya tingkat kemandirian daerah.
- d. Mempengaruhi tingkat inflasi.
- e. Menurunnya daya beli pemerintah dalam pembiayaan daerah.³¹

D. Dana Desa

1. Definisi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan tunjangan kinerja daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.³² Dana desa berasal dari dana pemberian pemerintah yang berasal dari

³⁰ Jeremi Erick Fandy Yeimo and Anak Agung Ketut Ayuningsasi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kawasan Non-Sarbagita Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 11 (2022): 1306–14.

³¹ Erick Fandy Yeimo and Agung Ketut Ayuningsasi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kawasan Non-Sarbagita Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 11 (2022): 1306–14

³² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara* (Jakarta, Indonesia, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan daerah, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.³³ Menurut Lukman Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah dari APBN yang diperuntukkan untuk desa guna membangun dan memberdayakan desa.³⁴ Theresia berpendapat bahwa Dana Desa merupakan dana yang diterima setiap tahun yang berasal dari APBN untuk mendanai segala penyelenggaraan, pengeluaran ataupun pembangunan desa.³⁵ Rosalinda berpendapat bahwa Dana desa diartikan sebagai dana yang dititikberatkan untuk pembangunan desa guna mendorong kemandirian masyarakat desa dengan menjalankan program-program yang telah dirancang.³⁶

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 dan para ahli mengenai Dana Desa dapat disimpulkan bahwa, Dana Desa merupakan dana dari APBN yang disetor kepada APBD sebagai tunjangan kinerja daerah, yang diberikan kepada desa guna membangun desa dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa dapat dilihat dari definisinya yaitu untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat desa, dan membuat desa mandiri dalam memperoleh pendapatan lainnya. Tujuan lain dari dana desa yaitu menciptakan ketentraman masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan dan fasilitas umum desa. Secara umum bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, membangun rasa sosial antar penduduk sehingga

³³ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 (Jakarta, Indonesia, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id>.

³⁴ Lukman Adi Santoso et al., Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kedua (Jakarta Pusat, Indonesia, 2019).

³⁵ Theresia Oktavia, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat," Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan 8, no. 5 (2019), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/34046>.

³⁶ Rosalinda, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito KABUPATEN JOMBANG (Malang; Universitas Brawijaya Malang: Jurnal Ilmiah, 2014).

kesenjangan menghilang dan memajukan sumber daya manusia yang ada di desa.³⁷

2. Sumber Dana Desa

Berdasarkan pada Permendagri Nomer 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada tiga sumber pendapatan desa yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil BUMDES, kas desa, pasar desa, irigasi, gotong royong berupa memberika jasa untuk membangun desa dan hasil dari pemungutan desa
- b. Transfer Desa berasal dari pajak daerah dan dana dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lainnya berupa dana hibah dan pendapatan desa yang sah.³⁸

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022.³⁹ Dana Desa berasal dari APBN yang disalurkan melalui rekening kas umum negara ke rekening kas desa, penyaluran tersebut disalurkan melalui rekening kas umum daerah. Berdasarkan Undang-undang penetapan pemberian Dana Desa dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 65% Alokasi Dasar yang dibagi secara merata untuk setiap desa, penerimaan ini dibagi berdasarkan jumlah penduduk yang ada di setiap desa.
- b. 1% Alokasi Afirmasi dibagi secara proporsional hanya untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah kemiskinan penduduk tinggi.
- c. 4% Alokasi Kinerja dibagikan kepada desa yang mempunyai kinerja terbaik.

³⁷ Pariha Oldrianti Sundawa, *Praktik Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Kelompok Perempuan Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang* (Medan, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014* (Jakarta, Indonesia, n.d.).

³⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Jakarta, Indonesia, 2022).

- d. 30% Alokasi Formula dibagi menurut jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan diatas pengelolaan Dana Desa ditujukan guna memulihkan ekonomi desa seperti program pengentasan kemiskinan, digunakan untuk mendukung dan membiayai pertumbuhan desa melalui program-program yang ada di desa. Contoh program yang dilakukan desa dengan menggunakan Dana Desa seperti:

- a. Membangun dan memperbaiki fasilitas desa, seperti Pasar Desa. Perbaikan pasar dapat menjadi salah satu program yang sangat membantu masyarakat desa. Perbaikan ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja, dengan program ini pemerintah desa dapat menyerap tenaga kerja dari desa untuk membangun. Pasar yang telah diperbaiki akan membuat nyaman masyarakat dan mensejahterakan pedagang. Kenyamanan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat.⁴¹
- b. Membuat PDAM atau PAM untuk masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan air bersih, air bersih ini ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dengan program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air rumah tangga, kesejahteraan masyarakat meningkat dan pendapatan desa bertambah. Program perbaikan fasilitas desa seperti, perbaikan jalan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas akses ekonomi.⁴²
- c. Mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aktifnya BUMDes dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi desa, BUMDes ini dapat menjadi salah satu pendapatan desa.⁴³

⁴⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Jakarta, Indonesia, 2022).

⁴¹ Didik Kurniawan, "Pemerintahan Desa Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Economic and Social* 4, no. 2 (2021): 152–59.

⁴² Anwar Fadli Prada, *Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan* (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2022).

⁴³ Putri Ayu Lestari and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, "Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya Dalam Pengelolaan Dana Desa

4. Dampak Dana Desa

Dana Desa sendiri memiliki dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Berikut ini dampak positif dari Dana Desa:

- a. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan antar masyarakat desa.
- c. Meningkatkan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan perkembangan ekonomi desa melalui pengembangan potensi desa seperti wisata, kuliner dan lain-lainnya.⁴⁴

Ada juga dampak negatif dari menurunnya Dana Desa.

Berikut ini dampaknya bagi desa dan masyarakat:

- a. Menurunnya tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Menurunnya pembangunan desa.
- c. Menurunnya tingkat pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan potensi desa yang kurang maksimal.⁴⁵

E. Alokasi Dana Desa

1. Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.⁴⁶ Menurut Hardianto Alokasi Dana Desa dapat diartikan sebagai wujud pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi supaya tumbuh dan

Sepakung Kabupaten Semarang,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 149–64.

⁴⁴ Lukman Adi Santoso et al., *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kedua* (Jakarta Pusat, Indonesia, 2019).

⁴⁵ Lukman Adi Santoso et al., *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kedua* (Jakarta Pusat, Indonesia, 2019).

⁴⁶ Muhammad Yunus, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)* (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2021).

berkembang mengikuti pertumbuhan desa.⁴⁷ Sedangkan menurut Maria Alokasi Dana Desa diartikan sebagai dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa yang berasal dari dana perimbangan.⁴⁸

Alokasi Dana Desa merupakan substansi baru yang ada dalam APBD. Alokasi Dana Desa ini dialokasikan dengan jumlah 30% untuk aparatur desa dan 70% untuk program-program pemberdayaan masyarakat.⁴⁹ Definisi mengenai Alokasi Dana Desa yang sudah dijabarkan sebelumnya oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa, Alokasi Dana Desa adalah dana dari pemerintah kabupaten untuk desa yang berasal dari 10% dana perimbangan. Dimana dana Alokasi ini digunakan 30% untuk kebutuhan hak aparat desa dan 70% untuk program-program pemberdayaan masyarakat desa, berasal dari dana perimbangan yang telah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

2. Sumber dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan yang sudah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Alokasi Dana Desa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana ini hanya difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa.⁵⁰ Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran dana desa, penyisihan pajak dan retribusi dan sumbangan dari pemerintah kabupaten.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa sama dengan Dana Desa, keduanya sama-sama diberikan pemerintah untuk membangun desa menjadi lebih maju. Berikut ini tujuan Alokasi Dana Desa:

⁴⁷ Hardianto, "Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022).

⁴⁸ Maria Erlinda Tanesab and Khonajah Hasan, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun* (Malang: Conference on Economic and Business Innovation (CEBI), 2021).

⁴⁹ Annisa Rizki Amnan, Herman Sjhruddin, and Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, no. 1 (2019): 37–46.

⁵⁰ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020, 2020.

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam membangun desa
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada di desa
- c. Mendorong perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat desa.
- e. Meningkatkan kualitas kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan desa.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan dengan memberikan kesempatan kerja yang memadai bagi masyarakat desa.⁵¹

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa bersumber dari 10% dana yang telah dikurangi dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil).⁵² Dana Perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berasal dari APBN. Dana perimbangan digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan daerah.⁵³ Alokasi Dana Desa kegunaannya dibagi menjadi dua. Pertama 30% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk aparatur desa. Kedua 70% digunakan untuk membiayai segala program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan desa.⁵⁴

Ketentuan pemberian Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap pemerintah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.⁵⁵ Pemberian dana ADD

⁵¹ DJPK Kementerian Keuangan, “Perbedaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.” go.id, 2022, <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

⁵² Muhammad Yunus, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya) (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2021)*.

⁵³ Ester Trivona Nauw and Ikhsan Budi Riharjo, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 6 (2021): 1–17.

⁵⁴ Annisa Rizki Amnan, Herman Sjhruddin, and Hardiani, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa,” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, no. 1 (2019): 37–46.

⁵⁵ Brigitta Venna Yulia Sandjaya, *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten*

paling sedikit 10% dari dana perimbangan. 10% dana tersebut setelah diterima desa akan dibagi kembali untuk membiayai operasional pemerintah desa dan membiayai program-program yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.⁵⁶ Ketentuan pembagiannya:

1. 30% untuk membiayai operasional pemerintahan desa, seperti menggaji kepala desa dan aparat desa, dan tunjangan operasional badan permusyawaratan desa.
2. 70% untuk membiayai program-program prioritas desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografi. Seperti program pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.⁵⁷

Ketentuan tersebut digunakan untuk meningkatkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat. Contoh program yang menggunakan Alokasi Dana Desa:

- a. Program pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan pariwisata yang ada di Desa.⁵⁸ Program ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi desa dan menambah pendapatan desa. Tujuan lain dari program ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja.
- b. Program pemberdayaan potensi desa. Seperti potensi produk unggulan yang ada di desa.⁵⁹ Program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM yang ada di desa untuk lebih baik lagi, program ini juga dilakukan untuk memperkenalkan produk unggulan ke dunia luar agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Pacitan (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2021), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/25804>.

⁵⁶ Arifin Muksin, Treesje Runtu, and Christian V. Datu, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no. 2 (2023): 1281–96.

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Jakarta, Indonesia, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id>.

⁵⁸ Budhi Pamungkas Gautama et al., “Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 355–69.

⁵⁹ Eshtih Fithriyana, “Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–9.

4. Dampak Alokasi Dana Desa

Dampak positif Alokasi Dana Desa bagi desa dan masyarakat desa yaitu:

- a. Meningkatkan ekonomi desa.
- b. Meningkatkan produktivitas masyarakat.
- c. Dampak sosialnya mempererat tali persaudaraan melalui kegiatan gotong royong dalam membangun desa menjadi lebih baik.
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁶⁰

Dampak negatif dari menurunnya Alokasi Dana Desa yaitu:

- a. Menurunnya tingkat kualitas hidup dan daya beli masyarakat.
- b. Timbulnya kesenjangan yang tidak dapat diatur
- c. Menurunnya tingkat ekonomi desa dan masyarakat.
- d. Menurunnya tingkat produktivitas masyarakat.⁶¹

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Karnila Ali dan Nur Wahyu Ningsih (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran. 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran. 3. Dana Alokasi

⁶⁰ Sofiya Apriyanti, “Dampak Program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 635–48.

⁶¹ Apriyanti. “Dampak Program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 635–48.

		Pengangguran		<p>Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.</p> <p>4. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.</p>
2	Yani Rizal, Iskandar dan Devra Wati Ritonga (2021)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh	Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (<i>Pant Analysis</i>).	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif langsung</p>

				<p>dan tidak signifikan terhadap Pengangguran.</p> <p>5. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif langsung dan tidak signifikan terhadap Pengangguran.</p> <p>6. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif secara langsung dan signifikan terhadap Pengangguran.</p>
3	Theresia Oktaviani (2019)	Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat	Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi sederhana.	<p>1. Dana Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.</p> <p>2. Dana Desa berpengaruh negative dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.</p> <p>3. Dana Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.</p>
4	Jeremi Erick Fandy	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,	Pendekatan kuantitatif dengan	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh</p>

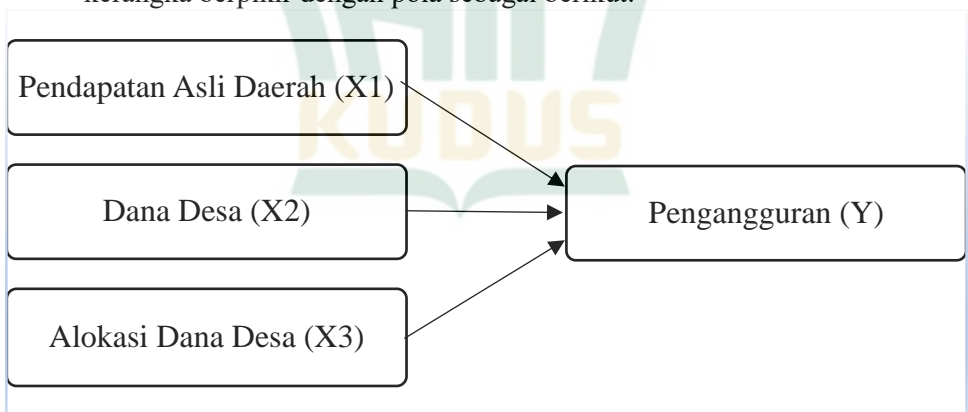
	Yeimo dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi (2022)	Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kawasan Non-Sarbagita Provinsi Bali	metode analisis regresi linier berganda.	<p>secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.</p> <p>2. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.</p> <p>3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.</p>
5	Suryanta (2019)	Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Depok.	Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskripsi dan analisis regresi linier sederhana.	<p>1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengelolaan PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengelolaan PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran.</p> <p>3. Kinerja</p>

				Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengelolaan PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dana pemerintahan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dana pemerintah digunakan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dalam upaya membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Dengan terlaksananya serangkaian kebijakan pemerintah seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan investasi pada potensi yang dimiliki daerah. Diharapkan dapat menyerap tenaga kerja melalui munculnya usaha-usaha baru, mobilitas masyarakat lebih lancar dan lain-lainnya, sehingga tingkat insentif pengangguran berkurang.⁶²

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan diparagraf sebelumnya untuk mengetahui hubungan antar variabel diperlukan kerangka berpikir dengan pola sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

⁶² Sri Wahyuni Mustafa, “Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dikota Palopo,” *Journal of Institution and Sharia Finance* 2, no. 1 (2019): 30–39.

Pertama yang dilakukan peneliti adalah mengetahui dan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran. Kedua hal lain yang ingin diketahui dan dilihat peneliti adalah pengaruh Dana Desa terhadap Pengangguran. Ketiga atau yang terakhir peneliti ingin mengetahui dan melihat pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pengangguran. Pertama, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dana pembiayaan otonomi daerah, yang bisa digunakan untuk membiayai segala kegiatan guna membangun daerah. Salah satunya membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti pariwisata. Dengan pembangunan potensi daerah melalui bidang pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Pengembangan pariwisata ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.⁶³

Kedua, Salah satu upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa yaitu dengan menurunkan angka pengangguran yang ada di desa. Penurunan ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan program padat karya. Program padat karya merupakan kegiatan pembangunan desa yang membutuhkan sumber daya manusia. Contoh kegiatan padat karya ini adalah perbaikan jalan atau pembangunan potensi desa.⁶⁴

Ketiga, Pemerintah desa juga memanfaatkan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa yang bersifat prioritas seperti, pengembangan desa wisata menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan adanya alokasi dana desa untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Selain pengembangan dibidang pariwisata, pemerintah desa juga bisa mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan pengembangan usaha ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja ini dimanfaatkan untuk meningkatkan

⁶³ Sukarni Novita Sari and Mercy Devina De Fretes, "Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Rkonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu," *Jurnal Abirawa* 2, no. 2 (2021): 6–12.

⁶⁴ Abd Karim Hadi, Ratna Musa, and A. Rezeki N.R Sadar, "Manfaat Program Padat Karya Revitalisasi Drainase Di Waktu Covid 19," *Journal Flyover* 2, no. 1 (2022): 39–47.

produksi. Produksi yang meningkat dapat menjadi sumber pendapatan desa.⁶⁵

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan yang masih perlu untuk diuji kebenarannya.⁶⁶ Hipotesis berasal dari kata Hipo yang mempunyai arti kurang atau lemah, dan kata Thesis yang berarti teori. Dante berpendapat bahwa hipotesis adalah sebuah praduga yang perlu untuk diuji dengan menggunakan data penelitian yang didapatkan.⁶⁷ Narkubo berpendapat hipotesis berasal dari pengalaman-pengalaman, teori, hasil diskusi, pembahasan yang ada di perpustakaan dan sebagainya.⁶⁸ Hipotesis dapat disimpulkan bersifat sementara dan masih menduga-duga, maka perlu dilakukan uji agar mendapatkan hasil yang sama atau berbeda.

Hipotesis sebenarnya tidak memiliki atauran umum, namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, hipotesis seharusnya menyatakan rumusan mengenai hubungan antara variable. Kedua, hipotesis yang dirumuskan harus ada dasar teoritiknya, dan dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Ketiga, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat. Padat dan jelas. Keempat, hipotesis yang dirumuskan mungkin untuk diuji.⁶⁹ Mengacu pada hipotesis yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris dari penelitian terdahulu. Maka hipotesis diajukan sebagai berikut:

1. H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Pati tahun 2015-2022.
2. H2: Dana Desa berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Pati tahun 2015-2022.
3. H3: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Pati tahun 2015-2022.

⁶⁵ Annisa Husniyah, Nazaruddin Ali Basyah, and Achmad Mustofa, "Dampak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Sibolga," *Journal Economica Didactica* 2, no. 1 (2022): 46–59.

⁶⁶ M Zaki and Saiman, "Kajian Tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2021): 115–18.

⁶⁷ Dante and Nyoman, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi, 2012).

⁶⁸ Cholid Narkubo and Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

⁶⁹ Arikunto and Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2012).